

# PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP IMPLEMENTASI UANG KULIAH TUNGGAL DI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

HASANUDDIN

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

[Hasanuddin@gmail.com](mailto:Hasanuddin@gmail.com)

## Abstrak

**Hasanuddin, 2019.** *Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Ibrahim dan Bapak Syamsul.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. (2) untuk mengetahui faktor determinan persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; menggunakan kualitas, serta disajikan dalam bentuk naratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar adalah secara umum memberikan persepsi negatif atau belum sesuai dengan harapan dan aturan yang ada. Seperti adanya pembayaran lain di luar Uang Kuliah Tunggal, penggolongan Uang Kuliah Tunggal yang belum berjalan sebagaimana mestinya, Uang Kuliah Tunggal mahasiswa jalur mandiri tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, Kebijakan Kuliah Kerja Nyata berbayar, dan Uang Kuliah Tunggal mahasiswa di atas semester delapan bagi program Strata Satu (S1) dan diatas semester enam bagi program Diploma Tiga (D3) yang tidak mengalami penurunan. (2) Faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal (sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat, motivasi) dan faktor eksternal (informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan, ketidakasingan informasi).

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara Indonesia dan pemerintah sebagai penyelenggara Negara berkewajiban untuk membiayainya. Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk Perguruan Tinggi Negeri adalah aspek pembiayaan. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu mencari formulasi dalam mengatasi masalah pembiayaan seperti ketidakmampuan Negara untuk membiayai pendidikan secara keseluruhan. Salah satu produk pemerintah dan DPR mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Salah satu poin yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah mengenai pembiayaan pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mahasiswa.

Menurut pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu :

Ayat (2) : Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.

Ayat (3) : Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Ayat (4) : Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.<sup>1</sup>

Untuk menindaklanjuti Undang-undang tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 mengeluarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 88

Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri.

Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. UNM mulai memberlakukan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun ajaran baru 2013/2014. Hal ini berdasarkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013 Tanggal 5 Februari tahun 2013, yang menginstruksikan kepada seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk melakukan dua hal yaitu:

1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.
2. Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.<sup>2</sup>

Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mulai berlaku tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013, sehingga biaya kuliah mahasiswa dibedakan berdasarkan kemampuan ekonominya yang sebelumnya disamaratakan sesuai dengan jalur masuk dalam sistem Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Secara umum tujuan dari kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ialah untuk menghapus uang pangkal sehingga biaya kuliah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa hanya dilakukan satu kali di setiap semesternya dan tidak ada lagi biaya tambahan di luar itu. Biaya tersebut telah menanggung semua kebutuhan mahasiswa setiap semesternya, mulai dari biaya yang berkaitan langsung dengan proses akademik maupun biaya yang sifatnya tidak langsung, seperti biaya perawatan sarana dan prasarana, biaya kemahasiswaan, dan lain-lain. Adapun penentuan besaran UKT mahasiswa didasarkan kepada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayai yang diatur dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017.

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini telah berlaku di UNM selama kurang lebih lima tahun. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dalam kurun waktu lima tahun tersebut, mahasiswa UNM seringkali melakukan aksi demonstrasi dalam mengkritik penerapan

kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap tidak sesuai dengan aturan dan tujuan diperadakannya kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Adapun beberapa indikasi permasalahan dari penerapan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sering dikritik oleh mahasiswa, yaitu :

*Pertama*, mengenai ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa dengan besaran golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang didapatkan. Seperti mahasiswa yang kondisi ekonominya di atas hanya mendapatkan golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) rendah. Sebaliknya mahasiswa yang kondisi ekonominya di bawah justru mendapat golongan yang tinggi. *Kedua*, penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa jalur mandiri yang dianggap tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayainya. Golongan UKT-nya langsung ditetapkan oleh pihak kampus sebelum mahasiswa dinyatakan lulus. Sedangkan kalau mau dilihat dari beberapa aturan yang mengatur mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) menegaskan bahwa penetapan golongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayainya. *Ketiga*, dimana dalam proses perkuliahan masih sering ditemukan pungutan di luar dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti uang penelitian, uang buku, uang ramah tamah, dan akhir-akhir ini diterapkan pungutan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Kuliah kerja Nyata. *Keempat*, mengenai kurangnya transparansi keuangan yang bersumber dari Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan judul “Persepsi Mahasiswa terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar .“

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang disusun, yaitu :

1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar ?
2. Bagaimana faktor determinan persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar ?

<sup>2</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
- 2 Untuk mengetahui faktor determinan persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat dijadikan bahan referensi bagi seluruh mahasiswa Universitas Negeri Makassar dan Lembaga Kemahasiswaan untuk menambah pengetahuan dan mempermudah pengkajian terkait dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT).
2. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya agar lebih mempermudah pengkajian dan pembahasan masalah yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi birokrasi Universitas Negeri Makassar dalam mengevaluasi penerapan/implementasi Sistem Uang Kuliah Tunggal demi usaha perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Makassar.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengertian Persepsi**

Pengertian tentang persepsi lebih dikaitkan dengan kondisi psikologi seseorang dalam memahami kondisi yang ada di sekitarnya serta memberikan makna dan penafsiran atas apa yang dia tangkap dari kondisi tersebut sehingga terjadi proses interaksi antara subyek dengan obyek persepsi. Seperti yang di kemukakan oleh Kreitner dan Kinicki bahwa persepsi adalah merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita menginterpretasikan dan memahami sekitar kita. Dikatakan pula sebagai proses menginterpretasikan suatu lingkungan. Orang harus mengenal objek untuk berinteraksi sepenuhnya dengan lingkungan mereka.<sup>3</sup>

#### **2. Indikator-indikator Persepsi**

Menurut Bimo Walgito, persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Penyerapan terhadap rangsangan atau objek dari luar individu.  
Rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik

pendengaran, penglihatan, dan merasakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- b) Pengertian atau pemahaman  
Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan didalam otak, maka gambaran tersebut dibandingkan, digolongkan (diklasifikasi) dan diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat.
- c) Penilaian atau evaluasi  
Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan criteria atau norma yang dimiliki individu secara subyektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama oleh karena itu persepsi bersifat individual.<sup>4</sup>

#### **3. Bentuk-bentuk Persepsi**

Menurut Robbins, persepsi terbagi atas dua bentuk, yaitu :

- a. Persepsi positif  
Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu obyek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.
- b. Persepsi negatif adalah peniaian individu terhadap obyek atau informasi tertentu dengan pandangan negatif, berlawanan dengan yang diharapkan obyek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi**

Menurut Miftah Thoha, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal: perasaan, sikap individu, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, nilai dan kebutuhan, minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawananan, hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.<sup>5</sup>

#### **5. Tinjauan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

Uang Kuliah Tunggal atau disingkat UKT merupakan sistem pembayaran kuliah

<sup>3</sup> Wibowo. 2013. *Prilaku Dalam Organisasi* . Jakarta: PT : Raja Grafindo Persada. Hal.59

<sup>4</sup> Ibid. p. 96

<sup>5</sup> Miftah Thoha. op. cit. p. 126

yang diberlakukan disemua Perguruan Tinggi Negeri mulai tahun 2013 sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 97/E/KU/2013 dengan dua poin himbauan kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri, yaitu :

1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru program S1 reguler mulai Tahun akademik 2013/2014.
2. Menetapkan dan melaksanakan tarif uang kuliah tunggal bagi mahasiswa baru program S1 Reguler mulai tahun akademik 2013/2014.<sup>6</sup>

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberlakukan secara nasional pada 28 Mei 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013. Mengacu pada konsiderannya, Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini disusun untuk :

1. Menentukan biaya kuliah pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah.
2. Meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan, perlu menetapkan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam peraturan ini, cara untuk menentukan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagai berikut :

UKT : BKT – BOPTN<sup>7</sup>

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. UKT ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemerintah (pasal 1). UKT terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat (pasal 2). PTN tidak boleh memungut uang pangkal atau pungutan lain selain UKT kepada mahasiswa, kecuali pada mahasiswa nonreguler yang jumlahnya tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah mahasiswa baru (pasal 5). PTN wajib menerapkan UKT kelompok I dan II minimal masing-masing 5 % dari jumlah mahasiswa yang diterima di tiap-tiap PTN (Pasal 4).
2. BKT adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program

studi di perguruan tinggi negeri, yang digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah (Pasal 1).

3. BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri (Pasal 1 permendikbud Nomor 58 Tahun 2012).<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 tahun 2017 :

Pasal 1 (4) Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa per semester pada program studi di PTN.(5) Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Pasal 2 (1) BKT digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan Pemerintah. (2) UKT ditetapkan dengan memperhatikan BKT.

Pasal 3 (1) UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; atau c. pihak lain yang membiayainya. (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PTN kepada Menteri untuk ditetapkan.<sup>9</sup>

Beberapa pasal diatas menjelaskan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sebagian dari Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang ditanggung oleh mahasiswa dan ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya sehingga besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dibagi kedalam beberapa kelompok mulai dari kelompok yang paling rendah sampai pada kelompok yang paling tinggi. Berdasarkan dari pasal-pasal tersebut, maka PTN tidak diperkenankan untuk menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya. Ini merupakan salah satu poin yang membedakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan SPP yang berlaku sebelumnya.

<sup>6</sup> Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 97/E/KU/2013

<sup>7</sup> Panji Mulkillah Ahmad. 2018. *Kuliah Kok Mahal ?*. Yogyakarta : CV.Ekonomi Kreatif. Hal.32

<sup>8</sup> Ibid. p.32

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 tahun 2017 pasal 6 dan 8

Dimana dalam SPP, besaran uang kuliah yang harus ditanggung oleh mahasiswa tidak dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi.

Dalam sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), PTN tidak boleh memungut uang pangkal/pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa baru kecuali bagi mahasiswa asing, mahasiswa kelas Internasional, mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/atau mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri. Pemungutan uang pangkal/pungutan lain bagi mahasiswa jalur mandiri harus tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Hal ini dijelaskan dalam pasal 6 dan 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017, yaitu :

Pasal 6 : PTN dilarang memungut uang pangkal/pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana untuk kepentingan pelayanan pembelajaran secara langsung.

Pasal 8 : (1) PTN dapat memungut uang pangkal/pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana, bagi :

- a. mahasiswa asing
- b. mahasiswa kelas Internasional
- c. mahasiswa yang melalui jalur kerja sama, dan/atau
- d. mahasiswa yang melalui seleksi jalur mandiri.

(2) uang pangkal/pungutan lain selain UKT yang dikenakan kepada mahasiswa baru program diploma dan program sarjana yang melalui seleksi jalur mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.<sup>10</sup>

Hakikat dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan. Biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayai. Secara sederhana, mahasiswa yang kemampuan ekonominya rendah akan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang rendah pula, dan sebaliknya mahasiswa yang ekonominya tinggi maka akan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa system Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah suatu sistem pembayaran biaya kuliah Perguruan Tinggi Negeri yang ditanggung oleh mahasiswa dengan cara satu kali pembayaran setiap semesternya sehingga tidak ada lagi pungutan diluar dari pembayaran tersebut dikarenakan seluruh kebutuhan mahasiswa selama kuliah sudah terhitung semua. Adapun penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap mahasiswa harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak yang membiayainya. Sehingga besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa bervariasi, mulai dari golongan yang paling rendah sampai kepada golongan yang paling tinggi.

### **B. Kerangka Konsep**

Pengetahuan mahasiswa terkait dengan implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UNM sangatlah penting, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan bermanfaat bagi mahasiswa dalam ikut terlibat berpartisipasi mengawasi penerapan regulasi yang berkaitan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pengetahuan itu tentunya bisa didapatkan dari berbagai sumber yang ada di dalam kampus, baik itu dari birokrasi kampus, pemberitaan media pers mahasiswa, maupun dari lembaga kemahasiswaan yang punya peran penting dalam membantu mahasiswa terkait informasi-informasi yang dibutuhkan dalam dunia kampus. Selain dari itu diatas, pengetahuan mahasiswa tersebut juga akan ikut membentuk persepsi mahasiswa terkait dengan implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hasil akhir dari sebuah persepsi adalah penilaian atau evaluasi. Dalam konteks ini, mahasiswa akan memberi penilaian atau evaluasi terkait dengan implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UNM yang selanjutnya akan memunculkan harapan yang diinginkan mahasiswa dalam penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kedepannya di UNM.

Mengetahui bagaimana persepsi dan faktor determinan persepsi mahasiswa terhadap implementasi menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Dimana persepsi dan faktor determinan persepsi mahasiswa antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain tentunya akan berbeda, yang salah satunya dipengaruhi dengan seberapa banyak pengetahuannya tentang Implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UNM. Mempersepsikan sesuatu berarti kita memiliki pandangan tertentu tentang hal yang kita persepsikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dipersepsikan oleh mahasiswa.

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 tahun 2017 pasal 6 dan 8

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Topik utama yang dikaji pada penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Mendeskripsikan hal-hal terkait dengan topik tersebut maka penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif karena dapat dengan mudah memahami interaksi sosial yang berkembang di lapangan dengan ikut berperan serta wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut.

Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar (FIS UNM).

### **C. Tahap-tahap Penelitian**

#### **a. Tahap pra penelitian**

Pada tahap pra penelitian ini, peneliti melakukan observasi awal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar untuk mengamati gejala-gejala yang berkaitan dengan implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang selanjutnya menemukan masalah yang peneliti merasa perlu untuk diteliti, kemudian mencari dan mengumpulkan bahan referensi yang diperlukan dalam penyusunan proposal penelitian.

#### **b. Tahap pelaksanaan penelitian**

Pada tahap pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara langsung dan melakukan studi kepustakaan serta mengambil dokumentasi.

#### **c. Mengidentifikasi data**

Dalam mengidentifikasi data yang merupakan tahap akhir setelah melakukan penelitian, pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi data-data yang diperoleh, baik itu dari data primer maupun data sekunder untuk dianalisis kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

### **D. Sumber data**

Ada dua bentuk data yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a) Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan

wawancara dengan informan di lokasi penelitian dengan kebutuhan data dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.<sup>11</sup>

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat berupa buku, jurnal, skripsi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

### **E. Instrumen Penelitian**

Menurut Sugiyono bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.<sup>12</sup> Adapun alat-alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu :

- a) Pedoman wawancara; digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan wawancara dengan informan.
- b) Buku catatan dan alat tulis; digunakan oleh peneliti untuk mencatat hal-hal penting yang didapatkan pada saat melakukan wawancara dan observasi di lokasi penelitian.
- c) Alat dokumentasi atau kamera; digunakan sebagai alat dokumentasi pada saat peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan.

### **F. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **a. Penelitian Lapangan**

Adapun teknik pengumpulan data yang diambil di lapangan yaitu :

##### **1) Observasi**

Teknik observasi yang digunakan yakni Observasi Non Partisipan yaitu dalam pengamatan ini, peneliti tidak berada di dalam atau melakukan keterlibatan dalam kegiatan yang diamati. Dengan kata lain, pengamatan berada di luar kegiatan yang diamati.<sup>13</sup>

##### **2) Wawancara**

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Menurut Sugiyono, bahwa Jenis wawancara semi-terstruktur sudah termasuk dalam kategori *in-*

<sup>11</sup> Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, hal.120

<sup>12</sup> Ibid. p.222

<sup>13</sup> Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, hal. 43

*dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>14</sup>

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data yang didapat dari lapangan yaitu dengan menggunakan data kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal, Koran, internet, majalah dan artikel yang berkenaan masalah penelitian.

**G. Pengecekan Keabsahan Data**

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

b. Ketekunan

Dengan ketekunan sebagai peneliti diharapkan dapat mempermudah proses penyelesaian penelitian ini, karena dengan adanya ketekunan segala hambatan akan dapat dilalui.

d. Menggunakan bahan Referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Seperti halnya data wawancara yang didukung oleh rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya.

e. Triangulasi

Menurut Sugiyono, triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu.<sup>15</sup>

1) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Adapun triangulasi teknik ditempuh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan untuk sumber data yang sama.

2) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3) Triangulasi Waktu

Keabsahan data juga sering dipengaruhi oleh waktu. Oleh karena itu dalam rangka pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi dan teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

**H. Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya penataan secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Menurut Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>16</sup>

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Gambaran umum lokasi penelitian**

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) adalah salah satu fakultas di Universitas Negeri Makassar (UNM), yang pada awalnya adalah Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS) IKIP Yogyakarta Cabang Makassar (tahun 1964), berubah menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) IKIP Makassar (1965) berubah menjadi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) IKIP Ujung Pandang (1982), kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar tahun 1999 dan tahun 2003 berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS), kemudian berubah kembali dengan nama Fakultas Ilmu Sosial dengan SK.Rektor No.4219/H36/KL/2008 Tanggal 11 Juni 2008 sampai sekarang dengan jumlah 9 Jurusan/Prodi yaitu PPKn, Pendidikan Sejarah, Sosiologi, Pendidikan IPS, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Antropologi, Administrasi Negara, Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan Administrasi Bisnis.

**B. Pembahasan**

**1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar**

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2013 yang ditandai dengan

<sup>14</sup> Sugiyono, op cit. p. 233

<sup>15</sup> Zakiatul Fitri. 2018. *Persepsi Guru dan Siswa terhadap Kekerasan Fisik dalam Pendidikan di SMK Negeri 2 Makassar*. Makassar : Universitas Negeri Makassar, Hal. 40

<sup>16</sup> Sugiyono. op. cit. p.246

keluarnya surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 97/E/KU/2013 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat itu yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mohammad Nuh. Peraturan kementerian tentang kebijakan UKT sudah berubah sebanyak empat kali, mulai dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 55 Tahun 2013, Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 Tahun 2014, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 22 Tahun 2015, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2016, dan terakhir Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017.

Pada tahun 2013 Universitas Negeri Makassar (UNM) sudah langsung menerapkan kebijakan UKT dan sampai sekarang ada beberapa bentuk implementasi kebijakan UKT di UNM yang selalu menuai kontroversi dari mahasiswa. Di antaranya adalah penerapan golongan UKT, adanya pembayaran lain di luar UKT, UKT mahasiswa jalur mandiri, Kebijakan KKN berbayar dan UKT mahasiswa yang telah melewati semester delapan bagi S1 dan semester enam bagi D3.

Untuk mengetahui seperti apa persepsi mahasiswa terhadap implementasi kebijakan UKT di UNM, maka peneliti menggunakan teori dari Bimo walgito mengenai indikator-indikator persepsi yang terdiri atas penyerapan rangsang atau obyek dari luar, pemahaman atau pengertian, dan penilaian atau evaluasi. Adapun yang menjadi obyek persepsi pada penelitian ini yaitu kebijakan UKT beserta implementasinya di UNM.

#### **a. Penyerapan terhadap rangsang atau obyek dari luar**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semua informan pernah mendengar dan melihat informasi atau pengetahuan tentang kebijakan UKT. Adapun yang menjadi sumber informasi mahasiswa yaitu lembaga kemahasiswaan, dosen dan birokrasi kampus, website, media sosial dan Koran/tabloid kampus (LPM Profesi UNM). Informan yang aktif sebagai pengurus di lembaga kemahasiswaan lebih sering mendapat informasi atau pengetahuan tentang UKT dibanding informan lain yang tidak pernah menjadi

pengurus lembaga kemahasiswaan. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi peneliti bahwa lembaga kemahasiswaan baik lembaga kemahasiswaan tingkat Program studi/Jurusan (HMJ/HMPS) maupun lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas (BEM dan Maperwa Fakultas) aktif melakukan pengakajian atau diskusi mengenai kebijakan UKT di UNM. Sebagian besar informan menjelaskan bahwa mereka pertama kali mengenal UKT melalui lembaga kemahasiswaan pada waktu masih mahasiswa baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan tiap tahun pada saat proses penerimaan mahasiswa baru yaitu melakukan sosialisasi mengenai kebijakan UKT kepada mahasiswa baru dalam bentuk pembagian selebaran tulisan dan melalui kegiatan diskusi yang aktif dilakukan setiap minggu.

Selain dari lembaga kemahasiswaan, informan juga sering mendapat informasi atau pengetahuan tentang kebijakan UKT melalui pemberitaan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Profesi (UKM LPM Profesi UNM) dalam bentuk berita online dan media cetak (Koran dan Tabloid). Semua informan mengaku pernah mendapat informasi tentang UKT dari LPM Profesi UNM. Adapun informasi atau pengetahuan yang didapat dari pihak birokrasi kampus (termasuk dosen) dianggap sangat minim. Informan hanya mendapat informasi saat wawancara penentuan nominal UKT, pada saat ada aksi demonstrasi tentang UKT, dan sesekali penjelasan dari dosen di kelas.

Sedikit banyaknya Informasi atau pengetahuan tentang kebijakan UKT yang diserap atau diterima melalui panca indera akan memberikan gambaran atau kesan dalam otak masing-masing informan. Dalam hal ini panca indera yang dipakai untuk menerima informasi tentang kebijakan UKT adalah indera penglihatan dan pendengaran. Semua informan menggunakan indera penglihatannya untuk menangkap informasi dari selebaran yang dibagikan oleh lembaga kemahasiswaan pada saat mahasiswa baru, pemberitaan LPM Profesi UNM (berita online, koran, dan tabloid), website dan media sosial. Semua informan menggunakan indera penglihatan dan pendengarannya untuk menangkap informasi ketika mengikuti kegiatan diskusi. Dan semua Informan menggunakan indera pendengarannya untuk menangkap informasi dari penjelasan birokrasi dan dosen.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa semua informan



menerima atau menyerap informasi tentang kebijakan UKT dengan menggunakan indera penglihatan dan pendengaran sehingga memunculkan gambaran atau kesan dalam otak mereka. Hal ini sesuai dengan teori Bimo Walgito bahwa indikator pertama dalam proses persepsi yaitu penyerapan rangsang atau obyek dari luar menggunakan panca indera.

**b. Pengertian atau pemahaman.**

Setelah adanya informasi mengenai kebijakan UKT yang ditangkap informan, maka proses selanjutnya adalah tahapan memahami atau memberikan pengertian terhadap informasi yang diterima tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pemahaman informan terhadap kebijakan UKT berbeda-beda. Ada yang hanya memahami gambaran umum mengenai kebijakan UKT dan ada pula yang memahami sampai pada aturan-aturan yang melandasinya. Sebagian besar informan memberikan pengertian bahwa UKT yang dibayar sudah menanggung semua kebutuhan mahasiswa setiap semester, jadi tidak boleh ada lagi pembayaran lain di luar itu serta dalam proses penentuannya didasarkan pada kemampuan ekonomi mahasiswa. Beberapa informan menjelaskan bahwa aturan yang mengatur tentang UKT yaitu Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 (Permenristek Dikti No. 39 Tahun 2017). Berdasarkan observasi dan studi kepustakaan ditemukan bahwa pemahaman informan terkait penentuan UKT harus didasarkan kepada kemampuan ekonomi sesuai dengan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 dan Permenristek Dikti No.39 Tahun 2017, yaitu:

- 1) Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, pihak lain yang membiayainya (UU No. 12 Tahun 2012 pasal 88 ayat 4)
- 2) UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; atau c. pihak lain yang membiayainya (Permenristek Dikti No. 39 Tahun 2017 pasa 3 ayat 1)

Adapun pemahaman bahwa UKT sudah menanggung semua kebutuhan selama satu semester sehingga tidak ada lagi pembayaran di luar itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2013 yang mencetuskan kebijakan UKT, yaitu :

- 1) Biaya yang dibayar mahasiswa akan mudah dikendalikan jika dikumpulkan jadi satu menjadi UKT. (Berita online okezone news)
- 2) Konsep UKT ini diawali berdasarkan realitas bahwa uang yang ditarik dari mahasiswa tersebut terlalu banyak. Selain biaya kuliah per semester, mahasiswa masih dibebani dengan berbagai macam sumbangan dari pembangunan gedung, biaya praktikum dan masih banyak lagi (Berita online Kompas.com)

Pemahaman atau pengertian mengenai kebijakan UKT yang disampaikan oleh informan adalah merupakan tahap kedua dari persepsi. Beberapa informan memahami kebijakan UKT sesuai dengan aturan dan penafsiran Mohammad Nuh. Namun, ada juga informan yang tidak memahami sama sekali seperti apa itu kebijakan UKT. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena proses pemahaman atau pengertian sangat bergantung kepada beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari internal maupun eksternal individu. Jadi, meskipun obyek sama, pemahaman yang terbentuk bisa berbeda. Persepsi bersifat individual dan subyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bimo Walgito bahwa indikator kedua dari proses persepsi adalah pemahaman atau pengertian.

**c. Penilaian atau evaluasi**

Beberapa jenis pembayaran lain di luar UKT yang pernah ditemukan oleh informan dan peneliti di lapangan diantaranya, pembayaran buku, jas almamater, penelitian, pembayaran KKN, dan pembayaran ramah tamah. Semua informan menilai negatif adanya pembayaran lain di luar UKT. Mereka mendasarkan penilaiannya terhadap harapan dan pemahamannya mengenai kebijakan UKT yang telah menanggung semua kebutuhan mahasiswa tiap semester. Hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Pembantu Dekan III FIS yang mengatakan bahwa adanya pembayaran lain di luar UKT tidak melanggar aturan karena memang UKT tidak sepenuhnya menanggung semua kebutuhan mahasiswa selama kuliah. Ada beberapa komponen yang tidak terbiayai dalam UKT. Berdasarkan studi kepustakaan mengenai aturan kebijakan UKT juga tidak ditemukan secara spesifik tentang komponen-komponen apa saja yang ada dalam pembiayaan UKT mahasiswa.

Adanya penggolongan UKT adalah implikasi dari syarat penentuan UKT yang didasarkan kepada kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya sesuai dengan apa yang

diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristek Dikti No.39 Tahun 2017. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa semua informan menilai penerapan golongan UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masih ada yang belum tepat sasaran. Mereka mengaku menemukan banyak mahasiswa lain yang mendapatkan jumlah UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya dan kebanyakan mahasiswa jalur mandiri dan hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti. Ada informan menganggap bahwa dalam proses penentuan UKT mahasiswa dengan menggunakan metode wawancara belum sepenuhnya bisa terjamin valid tidaknya data mahasiswa yang didapatkan karena mahasiswa bisa melakukan manipulasi terhadap data tersebut dan juga bisa memberikan jawaban yang tidak benar mengenai kondisi ekonominya. Ada juga informan yang berpendapat bahwa masih ada oknum yang curang dalam proses penentuan penerima beasiswa bidik misi. Sedangkan informan ahli dalam hal ini Pembantu Dekan III lebih menekankan bahwa dalam proses penentuan UKT mahasiswa harus menunjukkan data-data ekonomi yang benar supaya tidak ada kesalahan dalam penetapan UKT. Berdasarkan studi kepustakaan terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2017, ditemukan bahwa pihak kampus bisa melakukan penyesuaian UKT bagi mahasiswa yang mengalami perubahan kemampuan ekonomi.

Jalur mandiri merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru pada Perguruan Tinggi Negeri yang penyelenggaraannya dilakukan di masing-masing kampus. Semua informan menilai bahwa penerapan UKT mahasiswa jalur mandiri seharusnya tidak langsung ditetapkan dengan UKT tertinggi, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Penilaian mereka didasarkan pada pemahaman bahwa penentuan UKT mahasiswa harus didasarkan kepada kemampuan ekonomi mahasiswa. Hal ini berbeda dengan pemahaman informan ahli yang mengatakan bahwa UKT jalur mandiri berbeda dengan jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jalur mandiri ditetapkan UKT-nya sebelum mahasiswa dinyatakan lulus dan itu merupakan kewenangan dari pihak kampus untuk menyelenggarakan. Adapun berdasarkan studi kepustakaan ditemukan bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Mohammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013 tentang kebijakan UKT berlaku bagi semua mahasiswa baru, mulai dari jalur SNMPTN, SBMPTN dan jalur Mandiri. Selain itu, berdasarkan peraturan tentang kebijakan

UKT (UU No. 12 Tahun 2012 dan Permenristek Dikti No. 39 Tahun 2017) juga tidak ditemukan bahwa UKT mahasiswa yang melalui jalur mandiri bisa ditetapkan meskipun tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Adapun yang membedakan dengan jalur lain adalah mahasiswa jalur mandiri bisa dipungut uang pangkal satu kali selama mahasiswa baru. Namun, uang pangkal tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya.

Selanjutnya mengenai kebijakan KKN berbayar yang keluar pada tahun 2018. Dalam Surat Keputusan (SK) penetapan biaya pelaksanaan KKN dengan nomor 590/UN36/KU/2018 disebut bahwa nominal biaya KKN sebesar Rp.415.000 bagi program reguler dan Rp.590.000 bagi program terpadu. Biaya tersebut akan menanggung komponen pembiayaan pribadi pada saat KKN, seperti jas almamater, transportasi, dan honor bagi guru pamong khusus bagi program KKN Terpadu. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2017 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “ PTN tidak menanggung biaya mahasiswa yang terdiri atas : a. biaya yang bersifat pribadi, b. biaya pelaksanaan kuliah kerja nyata, c. biaya asrama, d. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri”. Sesuai hasil penelitian menunjukkan sebagian besar informan menilai bahwa kebijakan KKN berbayar seharusnya tidak ada karena biaya KKN sudah termasuk dalam komponen UKT. Adapun yang tidak ditanggung dalam UKT adalah biaya pada saat di lokasi KKN seperti pelaksanaan KKN sebelum-sebelumnya. Selain itu, ada juga informan yang tidak mempermasalahkan selama biaya yang dipungut tidak terlalu besar dan disesuaikan dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil studi kepustakaan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2017 menunjukkan bahwa biaya KKN memang merupakan salah satu komponen yang tidak ditanggung dalam UKT. Namun, yang masih belum jelas adalah mengenai penafsiran tentang biaya KKN yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Penafsiran dari mahasiswa mengatakan bahwa biaya KKN yang dimaksud adalah biaya pada saat dilokasi KKN sedangkan biaya yang dipahami oleh informan ahli dan pimpinan Universitas adalah semua biaya yang berkaitan dengan program KKN mulai dari persiapan pemberangkatan sampai penarikan kembali dari lokasi.

Bentuk implementasi yang terakhir adalah mengenai UKT mahasiswa di atas semester delapan bagi S1 dan semester enam bagi D3. UKT ditentukan berdasarkan jumlah Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di masing-masing Prodi/Jurusan. Komponen dalam BKT terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung dari kebutuhan mahasiswa mulai semester satu sampai semester delapan yang wajib diikuti bagi S1 dan sampai semester enam bagi D3. Total BKT yang telah dihitung kemudian dibagi menjadi delapan semester bagi S1 dan enam semester bagi D3. Sehingga setelah mahasiswa melewati semester minimal, seharusnya ada evaluasi yang dilakukan terhadap komponen BKT. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan menilai UKT mahasiswa di atas semester delapan bagi S1 dan semester enam bagi D3 harusnya diturunkan karena kebutuhan sudah berkurang dan hanya beberapa mata kuliah yang diprogramkan, bahkan rata-rata hanya program skripsi. Hal ini sesuai dengan hasil observasi bahwa rata-rata mahasiswa FIS yang telah melewati semester delapan hanya program skripsi. Beberapa informan juga memberikan perbandingan dengan kampus lain di Jawa yang sudah melakukan evaluasi dan penurunan UKT mahasiswa di atas semester delapan bagi S1 dan semester enam bagi D3 sebesar 50 persen dan ada juga yang mendasarkan kepada jumlah sks yang diprogram.

Menurut Robbins, bahwa bentuk-bentuk persepsi terdiri atas dua yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif merupakan penilaian individu terhadap suatu obyek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. Sedangkan persepsi negatif adalah penilaian individu terhadap obyek atau informasi tertentu dengan pandangan negatif, berlawanan dengan yang diharapkan obyek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian mahasiswa terhadap implementasi UKT di UNM terdiri dari penilaian negatif dan penilaian positif. Sebagian besar informan berpandangan negatif terhadap bentuk implementasi UKT di UNM, seperti adanya pembayaran lain di luar UKT, penggolongan UKT, UKT mahasiswa jalur mandiri, UKT mahasiswa di atas semester delapan bagi S1 dan semester enam bagi D3, dan hanya pada kebijakan KKN berbayar, beberapa informan berpandangan positif. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bimo Walgito bahwa indikator ketiga atau tahap terakhir dalam

proses persepsi yaitu adanya penilaian atau evaluasi.

## **2. Faktor Determinan Persepsi Mahasiswa Terhadap Implementasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar**

### **1) Faktor Internal, terdiri dari :**

#### **a. Perasaan**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa beberapa informan merasa diuntungkan dengan pemberlakuan UKT dikarenakan jumlah UKT yang mereka bayar sesuai dengan kondisi ekonominya. Namun, mereka beranggapan bahwa masih ada mahasiswa lain yang jumlah UKT-nya tidak sesuai dengan kondisi ekonominya. Sedangkan informan yang lain merasa bahwa kebijakan UKT justru tidak menguntungkan karena masih banyak pembayaran lain yang harus ditanggung mahasiswa selain daripada pembayaran UKT tiap semester.

Adanya perbedaan tentang apa yang dirasakan dengan diberlakukannya kebijakan UKT di UNM tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil persepsi informan. Tidak ada perbedaan yang mendasar antara informan yang merasa diuntungkan dengan informan yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan UKT di UNM.

#### **b. Sikap**

Sikap informan terhadap implementasi UKT di UNM terbagi atas dua yaitu ada yang bersikap acuh tak acuh dan ada yang bersikap responsif. Secara umum informan yang memilih sikap responsif lebih banyak aktif di lembaga kemahasiswaan, baik tingkat jurusan/prodi maupun ditingkat fakultas berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan. Informan yang bersikap responsif cenderung mempunyai persepsi yang mendasar mengenai kebijakan UKT ketimbang informan yang memiliki sikap acuh tak acuh.

#### **c. Keinginan atau Harapan**

Sesuai hasil wawancara, semua informan mengharapkan implementasi UKT bisa tepat sasaran (sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa), bisa terpenuhi fasilitas kampus yang memadai, dan bisa lebih transparan. Adanya perbedaan antara harapan dengan fakta implementasi UKT di UNM sangat berpengaruh terhadap hasil persepsi informan yang secara umum memandang negatif bentuk implementasi UKT di UNM. Hal ini juga sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, bahwa beberapa mahasiswa di FIS mendapatkan UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya (terutama mahasiswa jalur mandiri), adanya kekuangan ruangan

perkuliahan, dan juga adanya aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut transparansi UKT.

d. Perhatian/Fokus

Perhatian mahasiswa terhadap kebijakan UKT tentunya akan melahirkan pemahaman yang mendalam. Sesuai hasil penelitian, informan yang mempunyai perhatian lebih terhadap kebijakan UKT sampai ikut terlibat dalam aksi demonstrasi cenderung memiliki pemahaman dan persepsi yang mendasar ketimbang informan yang memilih acuh tak acuh. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa di FIS memiliki perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT, seperti ikut dalam kegiatan diskusi dan terlibat dalam aksi demonstrasi.

e. Proses Belajar

Proses belajar yang dilalui oleh informan mahasiswa terkait dengan kebijakan UKT berbeda-beda. Mereka mengaku sering mempelajari melalui forum diskusi, dengar-dengar pada saat ada aksi demonstrasi, membaca berita dari LPM Profesi UNM, artikel, tulisan di media sosial, dan literatur lainnya. Perbedaan proses belajar yang dilalui informan berpengaruh terhadap persepsi mereka mengenai implementasi UKT. Informan yang terbilang sering mempelajari kebijakan UKT mempunyai persepsi yang mendasar ketimbang informan yang jarang mempelajari kebijakan UKT di UNM.

f. Kebutuhan dan Minat / Ketertarikan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa informan mempunyai kebutuhan dan minat terhadap informasi atau pengetahuan tentang kebijakan UKT di UNM. Faktor kebutuhan dan minat terhadap informasi tentang kebijakan UKT di UNM memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mengetahui lebih banyak mengenai kebijakan UKT dan sedikit banyaknya akan berpengaruh pada persepsi informan terhadap implementasi UKT di UNM.

g. Motivasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa semua informan punya motivasi untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT di UNM. Adapun motivasinya berbeda-beda, diantaranya karena ingin punya pengetahuan lebih banyak tentang UKT, salah satunya mengenai transparansi alokasi UKT dan juga karena alasan solidaritas kepada mahasiswa lain yang terbilang kurang mampu secara ekonomi. Adanya motivasi informan menunjukkan bahwa mereka mempunyai dorongan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT sehingga akan berpengaruh terhadap persepsi mereka dalam melihat implementasi UKT di UNM.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai faktor internal yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap implementasi UKT, maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang paling banyak berpengaruh terhadap persepsi informan adalah faktor sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat, dan motivasi informan terhadap informasi atau pengetahuan tentang implementasi kebijakan UKT di UNM.

**2) Faktor Eksternal, terdiri dari :**

a. Latar Belakang Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan mahasiswa menganggap nominal UKT yang didapatkan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua mereka. Adapun latar belakang ekonomi keluarga informan sangat beragam. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan adapula yang bekerja serabutan atau tidak punya pekerjaan tetap. Perbedaan latar belakang ekonomi keluarga tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil persepsi informan terhadap implementasi UKT di UNM. Tidak ada perbedaan persepsi antara informan yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang mampu dengan informan yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu.

b. Informasi Yang Diperoleh

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa semua informan menganggap informasi atau pengetahuan tentang UKT yang mereka dapatkan dari lembaga kemahasiswaan, seperti HMJ/HMPS dan LPM Profesi UNM bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Hasil pengamatan juga memperlihatkan bahwa lembaga kemahasiswaan aktif melakukan diskusi dan riset terhadap kebijakan UKT. Berbeda dengan informasi atau pengetahuan yang berasal dari perseorangan dan pihak lain atau yang bersumber dari internet dan media sosial harus terlebih dahulu dicari tahu kebenarannya. Kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh akan berpengaruh terhadap pemahaman informan sehingga ikut membentuk persepsi mereka mengenai implementasi UKT di UNM.

c. Pengetahuan dan Kebutuhan Sekitar

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa semua informan menganggap mahasiswa FIS mempunyai kebutuhan akan informasi atau pengetahuan tentang kebijakan UKT di UNM. Adapun mengenai pengetahuannya, sebagian besar informan menganggap bahwa mahasiswa FIS sudah banyak yang tahu tentang UKT, sedangkan informan yang lain beranggapan

kalau pengetahuan mahasiswa FIS tentang kebijakan UKT masih minim atau kurang. Adanya pengetahuan dan kebutuhan sekitar (mahasiswa FIS secara umum) menandakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan UKT merupakan sesuatu yang familiar sehingga cukup berpengaruh terhadap persepsi informan tentang implementasi UKT di UNM.

d. Intensitas

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa intensitas informasi atau pengetahuan yang didapatkan informan tentang kebijakan UKT di UNM berbeda-beda. Ada yang intensitasnya sering dan ada juga yang kurang. Informasi atau pengetahuan yang sering didapatkan berasal dari lembaga kemahasiswaan, dan LPM Profesi UNM. Hal ini sesuai dengan hasil observasi, bahwa lembaga kemahasiswaan dan LPM Profesi UNM aktif memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai kebijakan UKT, baik dalam bentuk kegiatan diskusi, tulisan, dan pemberitaan di media cetak maupun online. Perbedaan mengenai intensitas informasi yang didapatkan berpengaruh terhadap persepsi informan terhadap implementasi kebijakan UKT di UNM. Dimana informan yang sering mendapat informasi cenderung memiliki persepsi yang mendasar mengenai kebijakan UKT dan implementasinya di UNM.

e. Keberlawanan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa semua informan pernah dan bahkan ada yang sering mendapat informasi atau pengetahuan yang bersifat pro kontra mengenai kebijakan UKT di UNM. Seperti pro kontra antara mahasiswa dengan birokrasi, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa. Pro kontra antara mahasiswa dengan birokrasi adalah yang paling sering didapatkan ketimbang pro kontra antara mahasiswa dengan mahasiswa sehingga hal ini cukup berpengaruh terhadap pembentukan persepsi negatif informan mengenai implementasi UKT di UNM. Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, bahwa setiap kali ada aksi demonstrasi mengenai kebijakan UKT, mahasiswa dan birokrasi selalu mempunyai pendapat yang berbeda.

f. Familiar Atau Ketidakasingan Suatu Objek

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menganggap bahwa informasi atau pengetahuan yang mereka dapatkan tentang kebijakan UKT di UNM bukan lagi sesuatu yang asing tapi sudah menjadi sesuatu yang familiar di kampus karena mulai sejak mahasiswa baru mereka sudah mendapatkan informasi tersebut. Namun, ada juga informan yang menganggap bahwa selain

ada beberapa informasi yang sudah tidak asing, masih ada beberapa juga informasi atau pengetahuan yang terbilang baru. Ketidakasingan informasi ternyata cukup berpengaruh terhadap pengetahuan yang didapatkan sehingga hal ini turut membentuk persepsi mahasiswa terhadap implementasi UKT di UNM. Adapun hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketidakasingan informasi mengenai kebijakan UKT karena lembaga kemahasiswaan termasuk LPM Profesi UNM aktif melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa baik dalam bentuk kegiatan diskusi, tulisan, maupun pemberitaan di media cetak dan online.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa faktor eksternal yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan persepsi informan mengenai implementasi UKT di UNM adalah faktor informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan serta hal-hal baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek.

## **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar adalah secara umum memberikan persepsi yang negatif. Artinya mahasiswa menganggap bahwa beberapa bentuk implementasi UKT belum sesuai dengan harapan mereka dan aturan yang ada. Seperti penerapan golongan UKT, adanya pembayarn lain di luar UKT, kebijakan KKN berbayar, UKT mahasiswa jalur mandiri, dan UKT mahasiswa di atas semester delapan bagi S1 dan di atas semester enam bagi D3.
2. Faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya persepsi mahasiswa terhadap implementasi Uang Kuliah Tunggal terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap, harapan, perhatian, proses belajar, kebutuhan, minat dan motivasi mahasiswa. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, keberlawanan dan ketidakasingan informasi atau pengetahuan tentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal.

### **B. Implikasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memberikan persepsi yang negatif terhadap implementasi kebijakan

Uang Kuliah Tunggal sehingga hal ini bisa berimplikasi agar kedepannya pihak birokrasi kampus sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian tujuan diberlakukannya kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Selain itu, juga bisa berimplikasi kepada mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian yang serupa demi mengembangkan hasil penelitian dan menjadi sumber referensi demi peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang lebih baik.

### C. Saran

1. Sosialisasi dan evaluasi mengenai implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal perlu dilakukan oleh pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan pihak birokrasi kampus (Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Jurusan / Program Studi) kepada seluruh mahasiswa sehingga bisa meminimalisir adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan yang menjadi landasan kebijakan tersebut. Salah satunya mengenai komponen yang ditanggung dalam Uang Kuliah Tunggal yang dibayar mahasiswa setiap semester.
2. Mahasiswa perlu meningkatkan proses belajar, baik melalui lembaga kemahasiswaan maupun belajar secara mandiri agar dapat mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Proses belajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asrul Nurdin. 2013. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi ke-2. Jakarta : Prenada Media Group.
- <http://www.profesiunm.com/2018/01/10/menengok-infrastruktur-kampus-unm-di-tahun-2017/>, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018, Jam 19.14 WITA.
- <http://edukasi.kompas.com/read/2013/02/07/19464057/Mendikbud.Uang.Kuliah.Tunggal.Ringkankan.Mahasiswa>, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018, Jam 19.22 WITA.
- <http://poskotanews.com/2013/05/27/kemendikbud-keluarkan-peraturan-soal-uang-kuliah/>, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018, Jam 21.17 WITA.
- Latipah, Eva. 2017. *Psikologi Dasar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulkillah Ahmad, Panji . 2018. *Kuliah Kok Mahal ?*. Yogyakarta : CV.Ekonomi Kreatif.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 Tahun 2013. Jakarta: Kemendikbud.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2017. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, No.158. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 97/E/KU/2013. Jakarta: Kemendikbud.
- Suwartono. 2014. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-25. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 1996. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*. Makassar : CV. Berkah Utami
- Walgito, Bimo. 1990. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wibowo. 2013. *Prilaku Dalam Organisasi* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zakiatul Fitri. 2018. "Persepsi Guru dan Siswa terhadap Kekerasan Fisik dalam Pendidikan di SMK Negeri 2 Makassar". *Skripsi*. Makassar : Universitas Negeri Makassar.